

BAB II

KERANGKA TEORI DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori Terkait Judul

1. Pengertian pendidikan politik

Sebagian kalangan masih meyakini bahwa ilmu politik bukanlah ilmu, melainkan hanya ilmu, aktivitas, seni murni. Untuk kategori terakhir, Politik seperti seni, teralihkan pengertian nilai Politik sebagai seni pemahaman realitas yang mungkin terjadi. Dengan kata lain, politik sebagai seni menunjukkan bahwa politik adalah kemampuan dan keterampilan seseorang untuk memenuhi semua tugas dan fungsi politiknya, seperti kepemimpinan dan mempertahankan atau merebut kekuasaan. Sampai di sini, menyebut politik adalah kegiatan selain sebagai ilmu atau ilmu pengetahuan. Sebelum politik diartikan sebagai ilmu atau pengetahuan, politik adalah kegiatan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, untuk pertama kalinya politik dipisahkan dari aktivitas manusia yang saling berhubungan dalam segala aspek kehidupan, termasuk aktivitas berbangsa dan bermasyarakat.

Pendidikan politik adalah kegiatan Untuk mempengaruhi, mengubah dan memodifikasi sikap dan perilaku berdasarkan nilai-nilai yang diharapkan benar dan membawa faedah bagi kehidupan sosial. Pendidikan politik adalah proses mengelola ikon pribadi. Prosedur pendidikan kesadaran kebijakan, pengetahuan dan implementasi. Penyajian simbol kekuasaan, proses interpretasi dalam struktur staf pengajar. Jika orientasi kepentingan nasionalnya positif, kontribusi kerja pendidikan organisasi partai cukup signifikan secara politik. Dalam konteks ini, partai politik berfungsi sebagai sarana dan mekanisme untuk menjalankan fungsi utama negara.¹

Seseorang berubah sehingga kemampuan yang dimilikinya meningkat dan berkembang. Seluruh tujuan pendidikan adalah untuk mengubah diri sendiri. Menurut Russel: “Ketiga teori tersebut semuanya berkaitan dengan tujuan pendidikan. Pertama, teori bahwa tujuan pendidikan adalah memberikan kesempatan bagi perkembangan masyarakat dan menghilangkan pengaruh-pengaruh yang menjadi penghambat. Kedua, tujuan pendidikan adalah untuk membudayakan orang dan memaksimalkan Sebuah teori pengembangan kemampuan manusia Teori ketiga

¹ Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 104.

menyatakan bahwa tujuan politik adalah untuk mempertimbangkan hubungan antara pendidikan dan masyarakat, karena pendidikan harus mampu mempersiapkan individu untuk menjadi warga negara yang lebih berguna.²

Pendidikan dapat melakukan peran pembantu dalam merealisasikan tujuan sistem politik yakni melalui beberapa fungsi sistem politik ke dalam jiwa dan akal pikiran masyarakat.³ Fungsi-fungsi terkait meliputi:

- a) Fungsi ideologis, di mana kekuatan politik mendikte ideologi, memaksa orang untuk hidup sesuai dengan itu, dan dengan demikian menjadi identitas komunal. Ideologi ini perlu ditanamkan dalam pikiran dan jiwa masyarakat. Hal ini tidak dapat dicapai hanya dengan hukum. Dalam konteks ini, sistem pendidikan menjadi penting karena dapat dijadikan sebagai alat untuk menanamkan nilai-nilai ideologis kepada masyarakat, khususnya generasi muda.
- b) Fungsi perkembangan, dalam arti bahwa pendidikan dapat menjadi jembatan yang terjadi antara perkembangan politik, peraturan perundang-undangan dan hukum, serta pemahaman, kesadaran, dan orientasi masyarakat.
- c) Fungsi distributif, yaitu terwujudnya pemerataan akses belajar sebagai institusi politik ditentukan oleh konstitusi untuk warga negara yang baik dalam bidang sosial, budaya, politik, dan ekonomi.
- d) Fungsi balasan, di mana pendidikan seperti halnya kekuasaan politik dapat memberika balasan dan sanksi kepada masing-masing individu, namun yang diutamakan dalam sistem pendidikan adalah balasan positif kepada siapapun yang melakukan perbuatan baik.

Politik dan pendidikan memiliki hubungan yang erat, berpolitik tanpa arahan berarti akan absurd, bisa juga dikatakan bahwa pendidikan tanpa campur tangan politik maka tidak akan bisa terarah. Pendidikan memiliki kaitan erat dengan politik, bahkan boleh dikatakan tidak ada pendidikan tanpa arahan politik. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk sebuah perilaku politik masyarakat disuatu Negara.

² Agus Salim, *Pendidikan Dalam Penguatan Basis Masyarakat*, dalam Agus Salim (ed). *Indonesia Belajarlah! Membangun Pendidikan Indonesia*, (Yogyakarta: Tiara Wacana).

³ Utsman Abdul Mu'iz, Ruslan, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*, Terjemahan Jasiman, dkk, (Solo: Era Intermedia, 2003), hlm. 34.

Begitu pula sebaliknya, lembaga-lembaga dan proses politik membawa dampak pada karakteristik pendidikan disuatu negara. Hubungan pendidikan dengan politik bersifat empiris, berlangsung lama sejak awal perkembangan peradaban manusia. Plato misalnya, melihat sekolah sebagai salah satu aspek kehidupan yang terkait dengan lembaga-lembaga politik.⁴

Aspek politik ini lebih ditekankan pada pendekatan institusional karena lebih menekankan pada perspektif kekuasaan dalam negara. Menurut Robson, politik sebagai *the studi of power in society*.⁵ Demikian pula, Deliar Noer memaknai politik sebagai studi yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah kekuasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Perspektif yang menekankan pada pendekatan pengambilan keputusan berbeda pula dengan pandangan instusionalis dan kekuasaan dalam memahami politik. Pendapat demikian juga disampaikan oleh Deliar Noer dalam kutipan yang dikemukakan oleh Supardan. Yang mengatakan bahwa politik adalah studi tentang pembuatan kebijakan publik. Kelompok ahli politik yang menggunakan pendekatan pembagian memiliki pandangan yang berbeda pula dari pendapat-pendapat sebelumnya mengenai politik. Dahl misalnya mengartikan politik sebagai hubungan yang kokoh dan melibatkan secara mencolok kendali, pengaruh, kekuasaan dan kewenangan.⁶

2. Landasan Pendidikan Politik di Indonesia

Pelaksanaan pendidikan politik di Indonesia berdasarkan pada Pancasila, UUD 1945 dan Sumpah Pemuda tahun 1928. Pancasila sebagai filsafah bangsa Indonesia dianggap sebagai identitas dan pandangan hidup bangsa yang dapat digunakan dalam menerapkan pendidikan politik bagi generasi muda dengan menggunakan Pancasila dan landasan Sumpah Pemuda, yang diharapkan para generasi muda akan mampu memahami karakter diri serta menggali keunggulan potensi diri, serta mampu meminimalisir kekurangan yang ada pada dirinya agar dapat mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dikemudian hari secara menyeluruh.

⁴ Sirozi M, *Politik Pendidikan Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: PR. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 55.

⁵ Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, (Jakarta: Bumi Aksara. Syadzilu, 2008), hlm. 56

⁶ Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 59

Pendidikan politik diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang “Partai Politik”. Pasal 31 tentang “Fungsi partai politik dalam memberikan Pendidikan politik”. Partai politik berperan dalam meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Memperkuat kemerdekaan, kedewasaan, dan persatuan negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara.⁷

Generasi muda disiapkan sebagai regenerasi politik di tanah air agar mereka dapat memahami dan sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam keikutsertaannya dalam membangun bangsa dan negara karena ditangan mereka diharapkan pembangunan Indonesia akan lebih baik. Asas dan prinsip Bhineka Tunggal Ika tidak dapat diabaikan dalam memaknai kehidupan bermasyarakat yang majemuk dengan landasan ekonomi dan budaya social yang berbeda, maka dengan membangun kehidupan bangsa dan menyatakan akan selalu salam harmoni.⁸

Inspirasi dalam semangat sumpah pemuda digunakan sebagai landasan politik bagi generasi muda untuk meningkatkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan yang dapat mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan serta semangat juang yang tinggi dalam menghadapi perkembangan di era globalisasi saat ini. Selain ketiga landasan yang sudah disebutkan tadi, landasan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam melaksanakan kegiatan pendidikan politik adalah keberadaan Negara Republik Indonesia serta Bhineka Tunggal Ika sebagai harga mati dalam menentukan bentuk ke negaraan sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Prinsip dan asas dalam Bhineka Tunggal Ika tidak bisa di sampingkan dalam memaknai kehidupan sehari-hari masyarakat kita, karena masyarakat kita adalah masyarakat yang pluralisme dengan berbagai macam latar belakang sosial budaya dan ekonomi yang berbeda, sehingga dalam mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara akan selalu terjaga keharmonisannya.⁹

3. Inti dan Tujuan Pelaksanaan Pendidik Politik di Indonesia

a. Inti Pendidikan Politik

Banyaknya konflik yang timbul di masyarakat disebabkan oleh adanya kontroversi, perbedaan pikiran, tindakan, dan kepentingan dalam masyarakat. Karena sangat

⁷ Berdasarkan Undang-undang No 22 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

⁸ Djoko S, Amelia, *Pendidikan Politik*, (Banten: Unpam Press, 2021), hlm. 31.

⁹ Djoko S, Amelia H, *Pendidikan Politik*, (Banten: Unpam Press, 2021), hlm. 31

wajar jika di masyarakat muncul beberapa persaingan, ketegangan, dan konflik. Dalam perspektif konflik, hidup bermasyarakat merupakan hidup di tengah ketegangan dan konflik. Politik dalam konteks ini adalah memengaruhi dan ikut mengambil keputusan di tengah medan politik dan pertarungan konflik tersebut.¹⁰ Itulah sebabnya, pendidikan politik dilaksanakan untuk mempersiapkan:

- 1) Kader-kader politik yang mampu berfungsi dalam pertarungan politik
- 2) Mendapatkan penyelesaian konflik
- 3) Sesuai dengan konsep politik yang telah ditetapkan. Untuk generasi millennial, pendidikan kewarganegaraan adalah suatu prosedur serta fase yang harus dilewati oleh kerangka politik masa depan untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang diperlukan untuk melakukan pemerintahan yang baik..

Karakteristik untuk mendukung adanya Pendidikan politik antara lain Nicholas Haines, Denis Heater, Robert Heater, Robert Stradling, Robert Dunn dan Prof. Ridley. Tetapi, karakter menentang pendirian Pendidikan politik di sekolah termasuk Samuel Beers, Roger Scruton, Sir Karl Popper, Michael Oakeshott dan Michael Polanyi.¹¹

Terdapat banyak masalah yang muncul akibat perbedaan pendapat politik di warga negara menjadi dasar pendidikan politik masyarakat Indonesia, khususnya generasi millennial. Perbedaan kepentingan sering menimbulkan perselisihan, yang terus menciptakan ketegangan dan konflik karena persaingan kekuasaan. Perilaku konflik politik mempengaruhi pengambilan keputusan. Oleh sebab itu pendidikan politik yang dilaksanakan di Indonesia untuk mempersiapkan generasi muda mampu berjuang dan berkompetisi secara sehat untuk menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam realitas kehidupan politik sesuai konsepsi dan unsur-unsur “Sistem Politik Pemerintahan Indonesia”.¹²

¹⁰ Kartini Kartono, *Pendidikan Politik*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1999), hlm. 18.

¹¹ <http://uungmashuri.blogspot.co.id/2011/01/pendidikan-politik.html> diakses pada tanggal 02 Juni 2022 pukul 20.41 WIB.

¹² Djoko S, Amelia H, *Pendidikan Politik*, (Banten: Unpam Press, 2021), hlm. 36

b. Tujuan Pendidikan Politik

Pembangunan bangsa dan negara membutuhkan peran aktif serta keterlibatan generasi millennial. Dengan demikian, dengan memberikan pendidikan kewarganegaraan, generasi millennial bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka memiliki kemahiran dan wawasan yang cukup di bidang politik. Pendidikan politik generasi millennial harus bertujuan untuk terlibat aktif dalam pembangunan bangsa dan negara. Oleh karena itu, generasi millennial wajib mempunyai wawasan politik dan kemahiran yang cukup supaya dapat menggunakan keterampilan tersebut untuk partisipasi politik yang bertanggung jawab.¹³

Pendidikan politik ditujukan untuk membentuk kepribadian politik adalah sekumpulan orientasi politik yang terbentuk pada masyarakat untuk menyongsong dunia politik.¹⁴ Tingkat keterlibatan dalam aktivitas politik dikuasai oleh kultur politik dan karakter seseorang yang melihat politik sesudah menelaah prosedur dan tahapan “pendidikan kewarganegaraan”. Oleh sebab itu, jika Pendidikan Kewarganegaraan diterapkan pada generasi millennial diinginkan mampu membentuk kepribadian yang matang dalam berpolitik. Tujuan pendidikan politik adalah:

- 1) Menjangkau masyarakat (perseorangan, klien, mahasiswa serta anggota masyarakat) untuk mengartikan kondisi sosial politik yang kontradiktif, berani menyampaikan kritik membangun terhadap keadaan masyarakat yang labil, mengarahkan tindakannya pada proses demokrasi yang sesungguhnya dan mampu memperjuangkan sesuatu yang pasti. kepentingan dan ideologi, terutama dalam kaitannya dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama.
- 2) Memperhatikan peran manusia setiap individu sebagai warga negara, mengembangkan segala keterampilan dan kemampuan (pengetahuan, visi, sikap, keterampilan dan lain-lain) agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses politik pembangunan bangsa dan negara.¹⁵

¹³ Idrus Affandi, *Kepeloporan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Dalam Pendidikan Politik*. Disertasi, 1996, hlm. 53.

¹⁴ Utsman Abdul Mu'iz Ruslan, *Pendidikan Politik Ikhwani Muslimin*, (Solo: Intemedia, 2000), hlm. 409.

¹⁵ Kartini Kartono, *Pendidikan Politik*, (Bandung: Penerbit Bandar Maju, 1989), hlm. 20.

Empat tujuan pendidikan politik. Pertama, mendorong perluasan visi, kepentingan, dan partisipasi dalam pemerintahan di tingkat lokal, provinsi, dan nasional, serta mendukung proses dan tujuan lembaga swadaya masyarakat. Kedua, memperdalam pemahaman tentang landasan sejarah, filosofis, politik, sosial dan ekonomi demokrasi dan konstitusi Indonesia dan negara-negara Barat. Ketiga, percaya pada keterlibatan rasional dan keselarasan dengan prinsip-prinsip inti dan nilai-nilai yang disajikan dalam dokumen-dokumen kunci seperti Deklarasi Hak Asasi Manusia dan konvensi terkait, Pancasila, UUD 1945 dan amandemennya, dan Sumpah Pemuda, yang mengikat bangsa Indonesia . dan menjadi alat untuk membangun kolaborasi. Keempat, mendorong pemahaman tentang peran mendasar kelembagaan dan nilai-nilai masyarakat sipil dalam perjuangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, egaliter, dan manusiawi di Indonesia.¹⁶

Hal tersebut mengacu pada tujuan pendidikan kewarganegaraan untuk menciptakan warga negara yang memiliki kesadaran politik sehingga kehidupan politik diperbarui untuk menciptakan sistem politik yang demokratis. Mari kita tinjau sosialisasi politik dari tiga perspektif, yaitu perspektif konsensus, perspektif konstruksi sosial realitas, dan perspektif humanistik. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membimbing generasi muda Indonesia untuk meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Sementara itu, tujuan pendidikan politik adalah untuk landasan UUD 19945 dan Pancasila sebagai salah satu usaha untuk membangun warga negara Indonesia sutuhnya.¹⁷

Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya menentukan efektivitas suatu sistem politik karena dapat melibatkan warga negara, tetapi juga membentuk kehidupan suatu bangsa di masa depan dengan berusaha mentransmisikan nilai-nilai politik yang dianggap penting menurut sudut pandang. terhadap kehidupan orang-orang yang terkena dampak. Untuk mencapai tujuan mulia di atas, pendidikan kewarganegaraan Indonesia harus dirumuskan sebagai rangkaian kegiatan pendidikan yang sistematis dan terarah untuk memantapkan

¹⁶ Nur M., Khoiron, *Pendidikan Politik Bagi Warga Negara*, (Yogyakarta: LKIS, 1999), hlm. 11.

¹⁷ Wibowo Puji, *Pelaksanaan Pendidikan Politik*, FKIP UMP, 2013, hlm. 15.

kesadaran politik dan kesadaran bernegara sekaligus mendukung pelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai falsafah hidup dan landasan konstitusional. uji. untuk mereformasi kehidupan politik bangsa. Indonesia mengacu pada menjaga sistem politik yang demokratis, sehat dan dinamis.¹⁸ Dalam pemajuan sistem politik yang demokratis, pemberian materi pendidikan politik dirancang sebagai upaya pembelajaran yang bergizi dan sistematis dengan meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam berpolitik, dengan tujuan berpolitik untuk menghindari berbagai konflik dan perselisihan yang timbul di masyarakat terjadi.

Ada keterkaitan yang tidak terpisahkan antara tugas pendidikan politik dengan tujuan pendidikan politik. Politik adalah keberhasilan pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan itu sendiri Analisis keberhasilan pendidikan kewarganegaraan dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu pertama sebagai gambaran yang jelas tentang sistem politik ideal yang diharapkan. Kedua, realitas atau situasi aktual masyarakat itu sendiri dibandingkan secara langsung dengan tuntutan sistem politik.¹⁹

c. Fungsi Pendidikan Politik

Secara lebih luas pendidikan politik diharapkan dapat diharapkan sebagai berikut:

- 1) Pendidikan politik sebagai pembentukan karakter bangsa. Dengan kata lain, pendidikan melibatkan aktivitas manusia. Kegiatan yang ditujukan untuk mengubah pikiran, sikap dan perilaku masyarakat ke arah yang menunjukkan kedewasaan. Pembentukan politik yang bermuara pada pembentukan karakter bangsa merupakan tahap awal dari kemerdekaan suatu bangsa. Juga dalam UU RI No. 2 Tahun 2008, bahwa salah satu tujuan partai politik adalah memperkuat kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
- 2) Pendidikan politik sebagai pengembangan kesadaran politik.
Hal ini juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, bahwa tujuan partai politik adalah untuk

¹⁸ Idrus Affandi, *Kepeloporan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Dalam Pendidikan Politik*. Disertasi, 1996, hlm. 57.

¹⁹ Wibowo Puji, *Pelaksanaan Pendidikan Politik*, FKIP UMP, 2013, hlm. 17.

meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesadaran politik yang relevan adalah proses di mana warga negara menjadi sadar akan hak dan kewajibannya.

- 3) Pendidikan politik sebagai pembentukan kader partai. Memang untuk menghasilkan kader partai politik yang handal dan kompeten diperlukan sistem kaderisasi yang efisien dan produktif. Pendidikan politik sangat strategis dalam pembangunan ini. Penekanan pada peran dan tugas partai dibedakan dalam dua hal, pertama peran dan tugas internal organisasi dan kedua partai politik juga melakukan tugas di luar organisasi.
- 4) Pendidikan politik sebagai penanaman ideologi bangsa. Masing-masing partai memiliki ideologinya masing-masing. Apakah ideologi kebangsaan, buruh dan komunisme. Ideologi yang diusung oleh partai sangat penting karena menggambarkan visi, misi dan tujuan partai. Secara politis, ideologi adalah rumusan keyakinan atau program suatu negara, rakyat, partai atau asosiasi politik lainnya yang bertujuan untuk mencapai tujuan politik tertentu.

Tingkat pendidikan politik pemilih baru masih sangat rendah. Pendidikan politik diatur dalam UU Partai No. 22 Tahun 2008. Pasal 31, kewajiban partai politik untuk memberikan pendidikan politik. Partai politik memiliki peran tersendiri dalam penyadaran akan hak dan kewajiban rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Memperkokoh kemandirian, kedewasaan dan membangun persatuan bangsa untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Pendidikan politik pada dasarnya adalah kegiatan pendidikan yang terus menerus berproses dalam diri seseorang, agar yang bersangkutan dapat lebih memahami dirinya sendiri dan keadaan di lingkungannya. Kemudian mereka mampu menilai secara kritis segala sesuatu kemudian menentukan sikap dan cara menghadapi masalah tertentu di lingkungannya. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan merupakan proses pembelajaran yang tidak hanya menambah pengetahuan dan informasi, tetapi juga menekankan kemampuan untuk

mendekati situasi secara kritis, menentukan sikap yang benar dan mempraktekkan tindakan atau perbuatan.²⁰

d. Peran Pendidikan Politik

Pendidikan politik harus berkembang bebas di tengah-tengah masyarakat sebagai gerakan anti humanisasi. Pendidikan kewarganegaraan juga harus memasukkan pelajaran yang berani dilanggar banyanya kekurangan di masyarakat yang membawa kesengsaraan bagi rakyat mengarah pada tingkat demokrasi yang sesungguhnya dan demokrasi yang hidup. Pelatihan politik juga mengembangkan daya kritis rakyat, di samping menunjukkan beberapa kemungkinan untuk mengfungsikan semua lembaga politik dan kemasyarakatan secara lebih pragmatis dan efisien. Lebih jelasnya, pendidikan politik harus bisa meningkatkan proses demokratisasi dari masyarakat bangsa. Masyarakat harus memaksimalkan hak mereka dalam berapresiasi, menyampaikan saran, dan pendapat serta tanggung jawab atas apa yang mereka lakukan dalam kehidupan berpolitik. Dalam bahasa pendidikan, pendidikan politik dinyatakan sebagai upaya untuk mempelajari dan mempraktikkan sistematisasi kegiatan sosial dan konstruksi politik manusia di wilayah negara. Hal ini dimaksudkan sebagai pembelajaran karena pendidikan kewarganegaraan harus dilakukan secara terus menerus agar masyarakat dapat terus meningkatkan pemahamannya terhadap dunia politik yang terus berkembang. Bahkan bisa dikatakan seseorang yang belajar politik kemudian drop out sudah berada di belakang perkembangan politik, karena politik masih berkembang.²¹

Hal ini memungkinkan berkembangnya bakat dan kemampuan setiap individu, dan persepsi tugas politiknya harus sesuai dengan posisi dan misi hidupnya. Semua aktivitas mereka berkembang atas dasar kebebasan dan kemauan sendiri, dalam hubungan permusuhan dan kerja sama, yaitu respon terhadap berbagai masalah sosial, ekonomi, budaya dan politik. Singkatnya, dialog dalam kelompok politik secara terbuka bertujuan untuk membangkitkan dan meningkatkan partisipasi politik yang kreatif untuk membangun

²⁰ Kartini Kartono, *Pendidikan Politik: Sebagai Bagian Pendidikan Orang Dewasa*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 63-64.

²¹ Kartini Kartono, *Pendidikan Politik: Sebagai Bagian Pendidikan Orang Dewasa*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 68.

kesejahteraan umum dan budaya bangsa di antara hubungan sosial dan disertai dengan tanggung jawab penuh.²²

Pendidikan politik dapat digunakan untuk menanamkan norma dan nilai yang dilandasi dan dijiwai oleh bangsa Indonesia, yang merupakan nilai-nilai inti untuk memajukan pengembangan diri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini agar masyarakat dapat memahami dan menghadapi ancaman yang dihadirkan oleh ideologi pendirian negara, yaitu Pancasila sejak dini. Tugas pendidikan politik ini adalah menjadi tanda pembangunan yang bisa dimanipulasi oleh kelompok atau kekuatan yang salah.

e. Partisipasi dan Sosialisasi Politik

Partisipasi dapat dipahami sebagai partisipasi menyadari orang yang berinteraksi social dalam situasi tertentu. Dengan pengertian ini, seseorang dapat berpartisipasi Ketika mereka menemukan jati dirinya dengan atau berkelompok melalui berbagai proses beberapa orang, nilai-nilai, tradisi, kepatuhan, serta tanggung jawab.²³

Partisipasi politik memiliki beberapa arti. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang partisipasi politik. Menurut Ramlan, partisipasi politik berarti partisipasi warga negara dalam semua keputusan yang berkaitan dengan atau mempengaruhi kehidupan mereka.²⁴ Herbert Mc Closky, seorang tokoh dalam masalah partisipasi politik adalah partisipasi sukarela dalam proses. Memilih pemimpin dan secara langsung atau tidak langsung dalam perumusan kebijakan public.²⁵

Partisipasi politik merupakan aspek penting dari politik demokrasi dan fitur modernisasi politik. Dalam masyarakat tradisional yang sifatnya kepemimpinannya dalam hal politik lebih ditentukan oleh elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam berpartisipasi memengaruhi pengambilan keputusan dan kehidupan bangsa relative sangat sedikit. Warga negara yang terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang

²² Kartini Kartono, *Pendidikan Politik: Sebagai Bagian Pendidikan Orang Dewasa*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 82-83.

²³ H. Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Paradigma, 2002), hlm. 29.

²⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widisarana Indonesia, 2007), hlm.140.

²⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 367

diperhatikan dalam proses demokrasi. Contohnya adalah adanya persaingan bebas antar relit yang memperebutkan dukungan public untuk menduduki jabatan. Salah satu bentuk dukungan masyarakat adalah partisipasi dalam pemilihan umum (pemilu) untuk memilih orang atau partai untuk menduduki jabatan public.²⁶

Sedangkan oleh Dennis Kavanagh, Sosialisasi Politik adalah proses di mana individu bisa menciptakan kultur politik dalam masyarakat, dalam arti melestarikan atau mengubahnya.²⁷ Sejalan dengan pandangan tersebut, Kenneth P. Langton menyatakan bahwa “Sosialisasi politik dalam arti luas adalah cara suatu masyarakat mentransmisikan budaya politiknya dari generasi kegenerasi”.²⁸ Pemahaman tentang budaya politik yang diturunkan dari generasi kegenerasi relatif tidak jelas. Namun, menurut Langton dapat dijelaskan sebagai orang yang memperoleh nilai-nilai politik, keyakinan, karakter atau perilaku. Itu tidak lebih dari bagian integral dari budaya politik.

Unsur terpenting pada pengenalan politik adalah peran aktor atau agen sosialisasi politik. Bentuk sosialisasi politik adalah bagian kontribusi besar dalam memberikan pengetahuan tentang segala hal. Aspek politik seperti nilai dan norma menunjukkan pelajaran dalam perilaku didasarkan pada pengetahuan dan informasi yang diperoleh melalui agen sosialisasi.²⁹ Berikut agent sosialisasi politik semacam ini.³⁰

a) Keluarga

Sebagai organisasi sosialisasi, memang demikian adanya. interaktif awal sejak kecil hingga berfokus pada individu. Keluarga memainkan peran Sangat baik untuk pembentukan kepribadian kepemimpinan dan bagaimana memperlakukan orang. Pengaruh keluarga pada individu

²⁶ Saiful Munjani, dkk, *Kuasa Rakyat*, (Jakarta: Mizan Publika, 2012), hlm. 76.

²⁷ Dennis Kavanagh, *Political Science and Political Behaviour*, (London: George Allen & Unwin Ltd, 1983), hlm. 34.

²⁸ Kenneth P. Langton, *Political Socialization*, (London: Oxford University Press, Inc., 1969), hlm. 4.

²⁹ M. Teguh Wibowo dan Effendi Hasan, “*Sosialisasi Politik bagi Pemilih Pemula di Lingkungan Keluarga*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Unsyiah, Vol. 2 No. 2, hlm. 538-539.

³⁰ Yovitas Octafitria, “*Media Massa Sebagai Agen Sosialisasi Politik pada Kaum Muda*”, Indonesian Journal of Sociology and Education Policy, hlm. 17-18.

sangat besar untuk membentuk sikap dan terlibat dalam interaksi politik yang positif.

- b) Sekolah
Tidak bisa dipungkiri bahwa sekolah merupakan agent sosialisasi. Kebijakan kontribusi penting bagi perkembangan sosialisasi dini sebelumnya diperoleh dari keluarga. Kurikulum dan peran guru dengan gaya Kepemimpinannya mempengaruhi pembentukan sikap atau pandangan mahasiswa dalam ilmu sosial, ekonomi, dan ilmu politik.
- c) Golongan Sosial
Golongan sosial merupakan agent yang kuat hubungannya Bersama setiap individu memiliki kemampuan untuk memotivasi kegiatan dibidang Politik, grup ini memiliki kepribadian, sehingga mudah untuk mengubah pendapat dan pandangan. Interaksi antar teman, misal motivasi untuk aktif kegiatan politik merupakan salah satu pendorong berkembangnya Partisipasi komunitas. Teman sebaya menjadi kelompok acuan untuk Mengembangkan sikap dan perilaku, termasuk ranah politik.³¹
- d) Media masa
Dalam warga modern, media massa telah menjadi sarana sehari-hari, berbagai media massa seperti Praktis, Radio, Internet memberikan berbagai ilmu dan pendidikan politik yang tinggi untuk warga. Misalnya, penyebarluasan informasi tentang kegiatan Politik, seperti debat politik dan informasi kenegaraan adalah sebuah bentuk peran media masa sebagai agent sosialisasi.
- e) Kontak politik langsung
Seluruh aktivitas berhubungan langsung dengan kontak politik. Aktivitas dengan mengenali atau tidak bisa memungkinkan seseorang mengalami proses sosialisasi politik. Sejumlah agent Politik bersama dengan keluarga, sekolah, kelompok sosial dan media masa berperan sebagai agen sosialisasi awal dengan efek menyerap pemahaman politik sebelum melakukan sosialisasi politik. Itu karena upaya Kehadiran simultan beberapa agen sosialisasi terbukti melalui interaksi antara Agen

³¹ Damsar, *Pengantar Sosialisasi Politik*, (Jakarta: Prenadamedia, 2010), hlm. 167

sosialisasi dengan objek sosialisasi terjadi secara bersamaan. Misalnya, terjadinya sosialisasi politik antara agen sosialisasi politik sekolah dan teman sebaya. Dikarenakan setiap individu bisa Pergi melalui interaksi dan hubungan dengan agen sosial yang berbeda.

Sosialisasi politik menunjukkan bagaimana anggota masyarakat harus berpartisipasi system Politik. Sosialisasi politik menunjukkan prosesnya yang membentuk sikap dan model politik perilaku. Selain Selain itu, sosialisasi politik juga salah satunya cara satu untuk diwariskan kepada generasi norma dan kepercayaan politik dari generasi ke generasi selanjutnya, suatu proses yang dikenal sebagai transmisi budaya. Politik yang disosialisasikan menciptakan serta mewarisi kultur politik suatu negara. Sosialisasi politik juga dapat menjaga budaya politik suatu negara adalah warisan budaya dari satu keturunan ke turunan selanjutnya.dengan demikian, sosialisasi politik mengubah budaya politik, yaitu sosialisasi yang dilihat atau dilakukan oleh suatu populasi atau sebagian darinya menjalani Tindakan politik yang berbeda.³²

Berdasarkan pengertian Hal di atas menunjukkan bahwa sosialisasi politik pada umumnya dapat dipahami sebagai sebagai negara untuk mentransmisikan budaya. Kebijakan yang berkaitan dengan prosedur keputusan kolektif atau politik public dari keturunan selanjutnya. Sementara kultur politik adalah jumlah total nilai, kepercayaan empiris dan symbol maksud yang mendefinisikan penciptan kondisi di lokasi yang aktif secara politik.

4. Demokrasi

Kata demokrasi memiliki dua asal Yunani, yaitu "demo" dan "kratos" ataupun "kratein". sesuai dengan arti harfiahnya Apa itu demokrasi, yaitu "demo", yaitu rakyat dan "kratos" artinya kekuasaan , jadi demokrasi memiliki arti Pemerintah dipimpin oleh rakyat. Demokrasi berarti makna Kekuasaan pada hakekatnya berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Konsep Demokrasi, Demokrasi adalah bentuk pemerintahan. Dalam negara yang penduduk negaranya mempunyai kedaulatan dan kewajiban, status dan kekuatan yang baik untuk melanjutkan hidupnya dan partisipasi dalam Kekuasaan negara, orang memiliki hak untuk berpartisipasi atau

³² Mas'ud, *Mengasah Naluri Publik, Memahami Nalar Publik*, (Bandung: Humaniora, 1995), hlm. 34.

mengawasi penyelenggaraan negara. Satu daya langsung, misalnya melalui tempat umum (domain publik) atau melalui perwakilan mereka terpilih. Bersikap adil dan jujur kepada pemerintah. Kepentingan rakyat membuat sistem pemerintahan nasional yang muncul dari negara yang diperintah rakyat, dan bermanfaat bagi orang oleh orang ke orang).³³

Lalu semuanya bagus dipandang sebagai bentuk lain dari nilai-nilai tinggi seperti keutamaan demokrasi. Demokrasi terkonsolidasi ketika demokrasi bisa diwakili dan semua aktor politik utama mampu bertindak sesuai anggaran & diharapkan menerapkan tolok ukur ini dimasa akan datang. Transisi menuju demokrasi sebagai proses pelembagaan harus fokus hanya pada penghapusan elemen anti-demokrasi dengan memeriksa bagaimana demokrasi bekerja & menambahkan elemen actual ketika mereka tidak berada. Oleh karena itu, subtype demokrasi integratif perlu dimanfaatkan, kombinasi antara pelembagaan murni dengan akuntabilitas hak-hak politik dan sipil. Kasus-kasus di mana sebuah rezim mengadvokasi tindakan kejahatan terhadap politik dan hak sipil etnis dan agama yang lebih rendah.³⁴

Nilai-nilai demokrasi sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Menanam Pada waktu ini, nilai-nilai demokrasi dapat dimasukkan awal dalam praktek saling menghormati. Demokrasi akan Jika semua warga negara memiliki nilai, itu akan tercapai Demokrasi. Perilaku demokrasi dan budaya demokrasi juga harus dibangun dalam kehidupan social. Menciptakan kultur demokrasi saja tidak cukup dengan menetapkan aturan yang harus diikuti oleh masyarakat, akan tetapi butuh dikenalkan /disosialisasikan untuk warga.

Nilai demokrasi merupakan nilai yang harus dilestarikan sebagai makhluk sosial dalam kehidupan berdemokrasi untuk menangani segala permasalahan yg muncul pada lingkungan.³⁵

Nilai-nilai demokrasi sebagai berikut:

- a) Menangani masalah secara aman & kelembagaan
- b) Menjamin terwujudnya perubahan yang damai dalam masyarakat yang sedang berubah.

³³ Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2010), hl. 2.

³⁴ Aji Deni, *Konsolidasi Demokrasi: Perbaikan Kualitas Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2016), hlm. 12.

³⁵ Suseno, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2013), hlm. 67

- c) Melakukan pergantian kepemimpinan secara teratur mengenai dan menerima begitu saja adanya kebhinekaan
- d) Menjamin keadilan.³⁶

B. Penelitian Terdahulu

Sumber data penelitian yang digunakan penulis juga berasal dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu sangat berpengaruh sebagai penyedia informasi dan bahan referensi yang bermanfaat bagi penulis, sehingga penulis menyediakan beberapa ahli yang membahas topik serupa agar lebih mudah dipahami sebagai berikut:

1. Mirza Hardian, Yayuk Hidayah, Anis Suryaningsih, Yoga Ardian Feriand, 2021. Penelitian ini berjudul “Gagasan Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda (Sebuah Kajian Literatur)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang konsep pendidikan politik warga negara muda dalam konteks Indonesia. Hal ini disebabkan menurunnya kesadaran politik di kalangan anak muda yang menjadi tantangan bagi perkembangan demokrasi Indonesia. Hasil penelitian ini menemukan bahwa konsep pendidikan kewarganegaraan warga negara muda dalam konteks Indonesia setidaknya menggunakan dua cara. Pertama, Dalam pendidikan kewarganegaraan warga negara muda dalam konteks Indonesia, beberapa dimensi pendidikan kewarganegaraan harus diperhatikan, yaitu kognitif dalam kaitannya dengan pengetahuan politik, afektif dalam kaitannya dengan pembentukan karakter dan aspek psikomotorik dan keterampilan intelektual dan partisipatif. Kedua, Isi Pendidikan politik dalam konteks Indonesia adalah demokrasi, kultur politik Pancasila, dan isu-isu global. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pendidikan politik merupakan pekerjaan yang sistematis dan berkelanjutan. Konsep pendidikan politik warga negara muda dalam konteks Indonesia merupakan upaya untuk menjawab tantangan apatisisme politik di kalangan warga negara muda.
2. Heru Nugroho, 2012. Penelitian ini berjudul “Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia”. Tujuan penelitian ini adalah Kami ingin menjelaskan varian-varian demokrasi, khususnya konflik antara demokrasi liberal dan demokrasi sosial. Selain itu, penulis memaparkan praktik demokrasi di Indonesia

³⁶ Hendri B Mayo, *Nilai Demokrasi*, (Bandung: PT. Bumi Aksara, 2012), hlm. 87

pasca reformasi 1998 dan menunjukkan permasalahan negara dalam mewujudkan masyarakat demokratis. Sebagai penutup, artikel ini ingin menjelaskan bahwa demokratisasi di Indonesia masih berlangsung dan masih banyak persoalan yang perlu dibenahi.

3. Mil'i Barqi Alfi, Triwahyuningsih Triwahyuningsih, 2019. Penelitian ini berjudul "Sosialisasi Politik Partai Solidaritas Indonesia melalui Media Massa". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sosialisasi politik Solidarność partai Indonesia melalui media. Sosialisasi politik memegang peranan penting dalam keberhasilan partai politik itu sendiri, penggunaan media massa untuk melakukan sosialisasi politik sudah meluas. Media sebagai aktor sosialisasi politik, memainkan peran yang semakin penting dalam mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, tindakan dan sikap politik masyarakat.
4. Abdillah Halim, 2021 penelitian ini berjudul "Politik & Gerakan Kebangsaan Pemuda Muslim (Studi Terhadap Kiprah GP Ansor Pada Masa Kelahiran hingga Masa Demokrasi Parlementer)". Tujuan penelitian ini adalah menelaah politik dan gerakan kebangsaan Gerakan Pemuda Ansor pada masa kelahiran hingga masa demokrasi parlementer. Politik dan gerakan kebangsaan adalah politik dan gerakan yang dicetuskan dalam rangka mempertahankan pilar-pilar kebangsaan, yaitu negara dan pemerintahan yang sah, konstitusi, stabilitas sosial, dan kelestarian ajaran Islam ahlussunah waljamaah. Gerakan Pemuda Ansor tampak konsisten dengan politik dan gerakan kebangsaan ini sejak masa kelahiran hingga masa demokrasi parlementer, dan juga hingga masa sekarang. Hal ini sangat dipengaruhi oleh ideologi gerakan dan politik NU sebagai mentor Gerakan Pemuda Ansor, yang bercorak kebangsaan, kemasyarakatan, dan keagamaan sekaligus.

C. Kerangka Berfikir**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**

Gambar 2.1 di atas menjelaskan bahwa Gerakan Pemuda Anshor Kecamatan Kayen, Pendidikan Politik, dan Sosialisasi Politik mempunyai hubungan keterkaitan untuk tujuan mewujudkan Nilai-nilai Demokrasi. Di dalamnya ada beberapa program dan upaya yang dilakukan GP Anshor Kecamatan Kayen.